

Peran Media Massa Online Terhadap Program Kerja Pemerintah Walikota Jayapura (Studi Bagian Hubungan Masyarakat Walikota Jayapura)

Rizal*, dan M. Subhan*

*Dosen Program Studi Pemerintahan, STISIP Silas Papare Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Desember 2025
Disetujui 22 Desember 2025

Keywords:

Smart City,
Media Massa Online,
Partisipasi Masyarakat,
Media Sosial.

ABSTRAK

Abstract : Jayapura City is one of the cities in Papua Province that has adopted the concept of a smart city. In line with the vision and mission that form the basis of the Jayapura Mayor's work programs, the education and health sectors have become major priorities in supporting governmental performance. Therefore, it is necessary to utilize advances in technology, such as online mass media, to ensure that government messages and objectives are effectively communicated to the public. In this context, the government established a policy through Law Number 37 of 2016 concerning Social Media Management. The role of online media facilitates the government in carrying out state administration and governance, while also enabling the public to actively participate in monitoring every step and policy taken by the government. This condition supports accountable governance that can be justified to the people. The purpose of this study is to describe and analyze the role of government online media and public participation through social media and websites, as well as to describe and analyze the influence of government online mass media on community participation in development in Jayapura City. This study employs a qualitative descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this research follows the qualitative analysis model proposed by Miles and Huberman, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role carried out by the public relations division of the Jayapura City Government has been proven to be significant. This is demonstrated by the Communication and Information Office (Diskominfo), which consistently performs its duties actively. However, there are challenges related to a lack of understanding among some members of the public who only read news partially, leading to different assumptions from the intended message, and consequently causing miscommunication. Nevertheless, the participation of communities from five districts indicates that the government has carried out its duties and functions appropriately. Through websites and social media, the public can easily and quickly access information, such as government program updates. This condition encourages community participation in government programs through the online mass media of the Jayapura City Government.

Abstrak : Kota Jayapura merupakan salah satu Kota di Provinsi Papua yang merupakan smart city, dalam visi-misinya yang menjadi Program Kerja Wali Kota Jayapura, sektor pendidikan dan kesehatan memang menjadi perhatian utama yang dalam menunjang kinerja pemerintahannya, maka perlunya untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti media massa online, agar apa yang di ingin pemerintah sesuai harapan untuk tersampaikan kemasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan undang-undang nomor 37 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Media Sosial. Dengan adanya peran media online bisa mempermudah pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran media online pemerintah, dan partisipasi masyarakat melalui medsos dan web, serta mendeskripsikan dan menganalisis peran media massa online pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh humas pemerintah Kota Jayapura dapat membuktikan memiliki peran yang signifikan, ini di buktikan dengan diskominfo yang selalu aktif dalam menjalankan tugas, tetapi adanya kendala terkait kurang pemahamnya sebagian masyarakat yang hanya membaca berita sepotong - potong, membuat asumsi yang berbeda dengan apa yang dituju, sehingga terkadang pesan tidak tersampaikan. Namun dalam hal ini adanya partisipasi dari berbagai masyarakat dari lima Distrik maka bisa dikatakan sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya. Melalui Web dan Media Sosial masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi dengan cepat, seperti informasi terkait Program Pemerintah. Hal ini membuat masyarakat bisa partisipatif terhadap program pemerintah melalui Media Massa Online Pemkot kota Jayapura.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Rizal,
Dosen Program Studi Pemerintahan,
STISIP Silas Papare Jayapura,
Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99221
E-Mail : stisipjayapura2@gmail.com

Pendahuluan

Media online memiliki peran penting sebagai sarana sosialisasi, transparansi, dan kolaborasi untuk program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Keberadaannya memungkinkan informasi program kerja daerah menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Peran utama media online terhadap program kerja Walikota Jayapura meliputi :

1. Penyebarluasan Informasi (Sosialisasi), Media online (termasuk portal berita daring, website resmi pemerintah, dan media sosial) menjadi saluran utama untuk menginformasikan program, kebijakan, dan hasil pembangunan kepada publik. Tanpa media, masyarakat tidak akan mengetahui program kerja yang sedang berjalan.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemerintah Kota Jayapura mengedepankan asas keterbukaan dalam tata kelola pemerintahannya, salah satunya melalui optimalisasi penggunaan website. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengakses informasi terkait prosedur layanan, biaya, dan status layanan secara online, yang berdampak positif pada peningkatan aksesibilitas dan transparansi.
3. Edukasi Publik Media online digunakan untuk memberikan edukasi yang baik melalui pemberitaan yang informatif dan menyejukkan, yang juga berkontribusi terhadap ketenangan dan ketertiban masyarakat.
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Dengan adanya akses informasi yang mudah, masyarakat diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
5. Alat Inovasi Pelayanan Publik: Pemkot Jayapura telah meluncurkan berbagai inovasi berbasis digitalisasi, seperti aplikasi E-Waniambey untuk pendataan penduduk non-permanen, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih baik.
6. Sarana Kolaborasi: Pemerintah daerah berharap insan pers dan media massa terus berkolaborasi dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik.

Peraturan walikota (Perwali) Kota Jayapura nomor 44 tahun 2023 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kota Jayapura, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan akses informasi hukum yang lengkap, akurat, dan terintegrasi, termasuk pengaturan teknis seperti standar aplikasi, hak cipta, dan repositori data untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan hukum elektronik, seperti yang termuat dalam data di situs web BPK dan Meridian Hukum. Poin-poin penting dalam Perwali ini meliputi sebagai berikut :

1. Tujuan: Membangun sistem JDIH yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat.

2. Materi pokok untuk mengatur secara spesifik tentang bagaimana JDIH di Kota Jayapura dikelola, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan produk hukum.
3. Aspek Teknis yaitu membahas dokumen kebutuhan perangkat lunak, perancangan aplikasi, manual penggunaan, hingga *source code*, yang semuanya menjadi milik Pemerintah Daerah dan diserahkan ke Dinas terkait untuk disimpan di Repositori.
4. Standar & Keamanan Aplikasi yang digunakan harus sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan, dengan penjaminan keutuhan, keaslian, dan ketersediaan data.
5. status peraturan ini dinyatakan berlaku dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan JDIH di lingkungan Pemkot Jayapura.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun pembagian peran menurut Soekanto. (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, masyarakat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Permenpan RB) menjadi acuan dasar media sosial dalam pemerintahan meliputi :

1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum
2. Disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya.
3. Keikutsertaan (Partisipasi) dan keterlibatan (Pemerintah) yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk
4. Mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah

Program yang bagus perlu didukung seluruh kalangan masyarakat yang salah satunya melalui media Online. Dengan terus berkembangnya media Online secara positif bisa memberi manfaat bagi warga Kota Jayapura, serta bisa sukseskan program pemerintah melalui peran bagian humas dibawah naungan Diskominfo saat ini. Media Online atau media sosial yang di sukai banyak kalangan, menjadi hal yang muda untuk mengakses informasi kebijakan pemerintah akan upaya kesejahteraan masyarakat. Adanya terkendala dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang saat ini masih kurang secara langsung di terapkan dilapangan dari berbagai macam karakter masyarakat. tentang "Peran Media Massa Online Terhadap Program Kerja Wali Kota Jayapura.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Pada kesempatan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang berfungsi menelaah berbagai keadaan dari objek secara natural atau sebagaimana adanya dengan melibatkan peneliti sebagai aktor utama atau kunci. Menurut Bodgan dan Taylor yang dikembangkan oleh Moleong. (Moleong:2007,4) menjelaskan bahwasanya metode penelitian kualitatif berusaha untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian sama dengan apa yang terjadi di lapangan tempat kejadian. Dengan alasan tersebut sejalan dengan hasil yang nantinya akan diolah menjadi data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang di kumpulkan bisa saja berupa dokumentasi seperti foto-foto kejadian, wawancara dan dokumen-dokumen yang masih bersangkutan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Dari penjelasan diatas metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengupas data yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian ini yaitu Menjelaskan peran media masad Online terhadap kinerja wali kota Japura dan juga menjelaskan peran Humas selaku pemerintah Kota Jayapura untuk mengembangkan pemahaman teknologi kepada masyarakat Kota Jayapura.

Fokus penelitian merupakan benang merah dari penelitian yang dilakukan dalam masa penelitian guna memperjelas arah dari pembahasan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian juga bisa diartikan sebagai pemusatan pembahasan untuk menemukan suatu tujuan yang di tentukan dalam penelitian. Fokus penelitian bisa berjalan lancar apabila dilakukan dengan metode observasi untuk mendapatkan fakta secara eksplisit. Menurut Moleong menjelaskan bahwasanya dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk sangat-sangat teliti terhadap problem yang terdapat dalam penelitian. Hemat peneliti fokus penelitian juga adalah

batasan-batasan dalam pengumpulan data dari masalah yang sedang diteliti. Karena secara tujuan bisa difahami bahwasanya fokus penelitian digunakan untuk menemukan data yang dianggap penting dalam penelitian. Secara garis besar bisa kita rangkum sesuai rumusan masalah serta tujuan penelitian maka fokus penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut: Pendampingan dari pihak pemerintahan Kota Jayapura untuk memaksimalkan kinerja Walikota Jayapura melalui media masa Online. Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang di teliti oleh peneliti bertempat di Kota Jayapura . Lebih tepatnya dilangsungkan di wilayah pemerintahan atau administrasi Kota Jayapura. Situs penelitian adalah tempat dimana kasus atau objek penelitian itu diteliti. Lebih tepatnya situs penelitian dalam kasus ini adalah bagian Humas dari pemerintahan Kota Jayapura . Nantinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap fakta bagaimana peran dari humas Kota Jayapura mengawal aspirasi masyarakat Kota Jayapura melalui media masa Online.

Sumber data dan jenis data sudah semestisanya dalam penelitian untuk mendukung hasil penelitian yang abash dan falid harus berasal dari sumber dan jenis data yang falid pula. Peneliti membagi-bagi data yang didapat dari penelitian lapangan untuk mengklasifikasikan data atau memisahkan data, mana yang mendukung penelitian dan mana yang tidak memiliki hubungan dengan penelitian. Pembagian sumber data ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yaitu : 1 Sumber data primer merupakan infromasi terkait penejelasan secara lansung guna menyelesaikan problem penelitian atau dalam kata lai ialah sumber utama. (Subagyo:2004,43) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari bagian humas di pemerintahan Kota Jayapura. Unutuk mengungkap bagaimana peran dari Humas untuk mengelola aspirasi dari masyarakat melalui media masa Online. 2. Sumber Data Sekunder Seperti namanya Sumber data sekunder merupakan data pendukung saja. Seperti dari pihak-pihak eksternal dari problem dan dari bebrbagai dokumen yang masih terkiat dengan permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono:2010,194). Data pendukung ini bisa di akses dari dokumentasi yang dikumpulkan peneliti atau penelitian terdahulu seperti ensklopedia, literature, buku-buku, artikel, maupun hasil laporan penelitin terdahulu dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data tersebut digunakan peneliti ini digunakan sebagai besikk data dari peran humas dari pemerintahan Kota Jayapura

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data. Dari langkah pengumpulan data ini diharapkan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat objektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam mengumpulkan data, peneliti membagi menjaadi tiga langkah yaitu: 1. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara guna mendapatkan data dari infroman yang diwawancarai. (Arikunto, 2002:132) Dalam kasus ini pihak pewawancara adalah peneliti, yang berusaha mengnkap informasi terkait objek penelitian dari infroman yang dimintai keterangannya. Sedangkan informan disini adalah pihak yang dimintai ketrangan oleh peneliti terkait obyek dalam penelitian. Dalam tahap ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil data yang absah, obyektif dan tidak menyimpang dari obyek penelitian itu sendiri. Relevansinya dengan objek penelitian ini adalah wawancara terhadap pihak yang masih berkaitan dengan humas pemerintahan kota Jayapura. Peneliti meminta keterangan dari pihak pemerintahan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dijadikan acuan dalam penelitian. Peneliti berharap dari wawancara mendapatkan data yang falid dan bisa dipertanggungjawabkan secara nalar. 2. Observasi yaitu teknik yang dilakukan memalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan lat indra (Arikunto, 2002: 149). Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan objek penelitian. Metode observasi bermanfaat bagi peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh serta metode observasi ini peneliti dapat menemukan hal hal yang belum terungkap oleh responden dalam wawancara (sugiyono:2014, 313-314) 3. Dokumentasi Teknik berikutnya yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah teknik dokumentasi. Dokumentasi ditinjau dari segi artinya ialah barang barang yang tertulis. Bisa kita fahami bahwasanya teknik dokumentasi merupakan tahap penyelidikan atau pengumpulan benda-benda yang bisa mendukung penelitian.

Analisis Data Sumber : Miles Dan Huberman (2014) Data yang diperoleh dari lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci yang kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Dari analisis data yang diterapkan dalam penelitian pada hakikatnya mempunyai tujuan agar dapat memberikan gambaran seara jelas bahwasanya kedudukan dari analisis data sangatlah penting.

Pembahasan

1. Peran Media Massa Online Terhadap Program Kerja Walikota Jayapura (Studi Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Jayapura)

Peran menurut Koentjaraningrat (2005:13) peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk pada perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Dari berbagai jenis peran diatas, sebagaimana di sebutkan oleh Soekanto, bahwasanya peran sendiri memiliki beberapa jenis, dari hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber terkait peran dari media massa Online terhadap program kerja walikota dan dapat di tarik kesimpulan berdasarkan beberapa indikator tersebut, yakni :

a. Peran Aktif

Peran aktif Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya : Peran media massa Online terhadap program kerja walikota tidak sepenuhnya atau belum 100% intens dalam ikut andil dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui media Online resmi pemerintah, dan secara tugas dan kinerja dari peran diskominfo sudah memenuhi tanggung jawabnya, tapi masih bisa di katakan kurang optimal, dan mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan adanya berbagai macam karakter masyarakat yang berbeda beda di media massa Online. Namun disisi lain kalau melihat dari program pemerintah yang sudah diterima semua oleh masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Sudah mampu bisa di katakan baik mulai dari segi partisipasi masyarakat di media Online dan lain sebagainya, sebagaimana yang di sebutkan dalam wawancara diatas. Terkait peran aktif dari diskominfo untuk perlu lebih melibatkan media massa Online dari luar untuk bisa menutupi kekurangan, agar bisa menghadapi berbagai karakter masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang yang mengenai tugas dan peran dari pemerintah tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan Walikota tentang Pengelolaan Media Sosial, sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 44 tahun 2023 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota Jayapura bertujuan menjamin aksesibilitas, keutuhan, dan keakuratan produk hukum daerah, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi peraturan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam menyediakan layanan hukum elektronik, sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut yang dapat ditemukan di laman resmi hokum.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut andil untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah, melalui media social. sehingganya adanya yang sedikit kurang optimal dan juga dengan adanya partisipasi masyarakat yang dominan dapat di harapkan bisa optimal, lebih terbuka atau dalam artian membaaur agar lebih mengenal apa yang menjadi program pemerintah dan sehingganya dapat mempermudah proses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karna kalau kita melihat tugas inti dari Peran media social, memberikan pelayanan dan informasi yang akurat dalam segi pembangunan. Pengelolaan Media Sosial dilakukan dengan strategi merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskan pada media sosial yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi. Strategi ini sebagai dasar yang tepat untuk melibatkan seluruh lembaga serta masyarakat sebagai pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk kepentingan bersama Jadi dengan melakukan peran yang di anjurkan tersebut ada harapan dari berbagai pihak terhadap program kerja walikota yakni adanya tanggung jawab yang lebih dan amanah juga terhadap apa yang menjadi tugasnya dan juga dapat terlaksananya program pemerintah dengan sebaik-baiknya baik.

c. Peran Pasif

Peran pasif dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam sebuah program yang matang kita selalu meminimalisir dan mengantisipasi yang namanya sebuah kegagalan yang sering terjadi kendala dilapangan, dalam artian kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan atau program yang sudah di rencanakan, namun disisi lain terkadang kenyataan di lapangan masih mengalami kendala. Sebagaimana salah satu yang bisa di katakan sebuah kegagalan pasalnya dari beberapa program pemerintah melalui media massa Online masi belum tersampaikan dengan optimal. Pada dasarnya Diskominfo memiliki tugas salah satunya mengenai pelayanan dan informasi pemerintah yang dicanangkan, terlebih mengenai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Permenpan RB) menjadi acuan dasar media sosial dalam pemerintahan meliputi : 1). faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum; 2). disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya; 3). keikutsertaan (Partisipasi) dan keterlibatan (Pemerintah) yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara

memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah; a). interaktif, yakni komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah; b). harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait; c). etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik; d). kesetaraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan; e). profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi; f). akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat di pertanggung jawabkan (Permenpan RB No 83 Tahun 2012).” Jadi untuk untuk terkait lebih lanjutnya yaitu, perlunya pemantauan lebih intens lagi terkait program pemerintah yang perlu disampaikan, melalui media Online baik yang terealisasi maupun belum terealisasi dalam sebuah upaya memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat Kota Jayapura.

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Media Massa Online melalui Humas Pemkot Kota Jayapura dibagi tiga peran yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, Peran Pasif, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran Aktif Bahwa untuk peran media massa Online terhadap program kerja Walikota jayapura sudah diterapkan di Kota jayapura dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sudah dijalankan, yaitu dengan menggunakan media-media seperti Web dan Sosmed. Untuk akses masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintah, masyarakat sudah dipermudah dengan adanya media Online tersebut dan informasi yang didapatkan juga sudah jelas apa saja yang disampaikan. 2. Peran Partisipatif Bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan program pemerintah sudah ikut terlibat, seperti Like, Komentar, dan Shaer. Serta dalam akun resmi media Online pemerintah, dimana masyarakat saling berkomunikasi dalam memberikan saran. Selanjutnya untuk upaya 2 Pemerintah ini, berupaya agar tidak adanya informasi yang salah atau Hoax, sehingga bisa tepat sasaran untuk masyarakat, agar tercapainya keberhasilan program yang telah di jalanka oleh pemerintah kota. 3. Peran Pasif Pada tugas yang dibawah naungan Diskominfo untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terhadap program kerja walikota ini, memiliki peran yang signifikan pada program yang dicannangkan, meskipun ada beberapa kendala seperti pembaca yang tidak mengambil secara penuh informasi, yang berdampak pada informasi yang pasif. Maka pemerintah terus berupaya untuk memberikan terbaik, melalui media massa Online seperti Web dan Medsos, serta pemerintah secara langsung oleh Walikota untuk menyapa kepada masyarakat melalui live di medsos, yang terdiri dari berbagai macam masyarakat dari lima kecamatan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran dari peneliti, yaitu :

1. Peneliti berharap agar diskoinfo sebagai pelayan publik lebih ditingkatkan untuk edukasi masyarakat atau juga terus lagi akan informasi-informasi yang ada, agar masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru mengenai program pemerintah yang akan dilaksanakan kedepannya melalui peran media massa Online. informasi untuk memberdayakan yang bertujuan untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat.
2. Peneliti berharap agar masyarakat tetap berpartisipasi dalam berkontribusi terhadap program pemerintah melalui media massa online, karena partisipasi masyarakat merupakan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mendukung program pemerintah.
3. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut setelah peneliti tentang hal peran media massa Online dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan lebih kontekstual dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Abu, Ahmadi. 1982. Psikologi Sosial. PT. Bina Ilmu Soerjono
- Peraturan walikota (Perwali) Kota Jayapura nomor 44 tahun 2023
- Permenpan RB No 83 Tahun 2012”
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Margono. Metode Penelitain Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),h.1.
- Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung